



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY (NFA)



Laporan Bulanan

FEBRUARI 2025

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi
dan Keamanan Pangan



Badan Pangan Nasional

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya sehingga “Laporan Bulan Februari 2025 Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan” dapat diselesaikan.

Laporan ini berisikan program dan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dilaksanakan pada bulan Februari 2025 sebagai bentuk implementasi kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Kami menyadari laporan ini masih belum sempurna, karena itu saran untuk perbaikan pada periode berikutnya sangat diharapkan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program kegiatan dan semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Jakarta, Maret 2025

Deputi Bidang Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan



Dr. Andriko Noto Susanto, SP., MP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 <i>Latar Belakang</i>	1
1.2 <i>Tujuan</i>	1
1.3 <i>Metodologi Penyusunan Laporan</i>	2
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT	3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	5
3.1 <i>Realisasi Fisik dan Keuangan</i>	5
3.2 <i>Monitoring Kegiatan Prioritas</i>	12
BAB IV PENUTUP	54
4.1 <i>Kesimpulan</i>	54
4.2 <i>Permasalahan</i>	54
4.3 <i>Rekomendasi</i>	54
LAMPIRAN	55
<i>Lampiran 1. Lembar III DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2024</i>	55
<i>Lampiran 2. Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Februari Tahun 2025 Sesuai Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan</i>	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2025, Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu: 1) pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 2) pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan; 3) pemantapan penganekeagaman konsumsi dan keamanan pangan; dan 4) dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional. Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA-125.01.1.690590/2025 tanggal 2 Desember 2024 Deputi Bidang Penganekeagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mendapat alokasi anggaran Rp. 40.284.839.000,- (Empat Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Hasil dari pemantauan dan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Februari Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Deputi Bidang Penganekeagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan posisi bulan Februari tahun 2025. Laporan ini sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Februari Tahun 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output Deputi Bidang Penganekeagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bulan Februari tahun 2025 baik fisik maupun keuangan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Penganekeagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Badan Pangan Nasional pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2 Tujuan

- 1.2.1 Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Deputi Bidang Penganekeagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan posisi bulan Februari Tahun 2025.

1.2.2 Mengetahui realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan Februari Tahun 2025.

1.3 Metodologi Penyusunan Laporan

1.3.1 Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.

1.3.2 Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.

BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Februari tahun 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi ke-1 pada bulan Februari Tahun 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Februari ditargetkan sebesar 0,42%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Deputi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bulan Februari 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-1.

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Februari 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp) 0.42%	Fisik
6877 Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			40.284.839.000 12.333.462.000*		169.196.324 51.800.540*	
ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000 679.000.000*	9 rekomendasi kebijakan	5.223.792 2.851.800*	0 rekomendasi kebijakan
AEA- Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000 1.635.382.000*	10 kegiatan	33.214,852 6,868,604*	1 Kegiatan
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000 1.264.060.000*	9 kegiatan	19.439.616 5.309.052*	0 Kegiatan
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000 391.010.000*	3 Kegiatan	20.414.730 1.642.242*	0 Kegiatan

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Februari 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp) 0.42%	Fisik
AFA-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000 46.825.000*	3 NSPK	2,520,000 196,665*	1 NSPK
	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000 276.550.000*	5 NSPK	4.200.000 1.161.510*	0 NSPK
	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000 211.400.000*	3 NSPK	1.260.000 887.880*	0 NSPK
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	2.000.000.000 1.176.595.000*	10 UMKM	8,400,000 4,941,699*	0
PCA-Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	2.500.000.000 722.860.000*	500 Produk	10.500.000 3.036.012*	3 Produk
PEH-Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000 1.075.400.000*	1 Kegiatan	14,700,000 4,516,680*	1 Kegiatan
QDB-Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Operasional pasar pangan segar aman Pusat	904.729.000 60.100.000*	2 Lembaga	3.799.862 252.420*	0 Lembaga
	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang dibina	1.499.760.000 707.390.000*	22 Lembaga	6.298.992 2.971.038*	0 OKKP
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	684.460.000 116.250.000*	1 Kelompok Masyarakat	2,874,732 488,250*	0
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan	2.998.000.000 1.389.630.000*	1 Laporan	12.591.600 5.836.446*	0 Laporan
QMA-Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000 356.010.000*	1 Data	6,300,000 1,495,242*	0 Data
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000 2.225.000.000*	4 Unit 2 Unit*	17.661.000 9.345.000*	0 Unit

Catatan: * : Anggaran setelah dikurangi blokir

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2025, Nomor DIPA 125.01.1.690590/2025 tanggal 5 Desember 2024 Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 40.284.839.000,-. Pada Bulan Februari 2025, terjadi revisi DIPA berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di mana efisiensi belanja Badan Pangan Nasional sebesar 60,16%. Sehubungan dengan hal tersebut, anggaran Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dapat dibelanjakan pada bulan Februari 2025 adalah sebesar Rp. 12.333.462.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Realisasi keuangan pada bulan Februari Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2 Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Februari Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (0,42%)		Realisasi Bulan Februari 2025		Realisasi SP2D hingga Februari 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			119.243.880		157.813.733		208.931.578	
ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan								
	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	5.223.792 2.851.800*	0 rekomendasi kebijakan	0	0 rekomendasi kebijakan (Kertas Posisi Rekomendasi standar keamanan dan mutu pangan tlh diklaim di Bln Januari. Kertas posisi Indonesia pd forum Codex sdh diklaim di Bulan Jan 2025	0	0 rekomendasi kebijakan 1. Kertas Posisi Indonesia pada Sirkulasi ke 2 EWG Pembahasan Second Draft of Sampling Plan for Total Aflatoxins and Ochratoxin A in Nutmeg, Dried Chilli and Paprika CCCF; 2. Penyampaian CRD (Conference Room Document)

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (0,42%)		Realisasi Bulan Februari 2025		Realisasi SP2D hingga Februari 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
								Sidang CCFFV ke-23 3. Rekomendasi standar keamanan dan mutu pangan (pelabelan pangan segar).
AEA-Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	33,214,852 6,868,604*	1 Kegiatan	40,844,074	1 Kegiatan	44,571,574	2 Kegiatan
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	19.439.616 5.309.052*	0 Kegiatan	6.115.180	0 kegiatan	6.115.180	0 kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Pelantikan pejabat PPNS • <i>BTSF Sustained Training Mission on Composite Products</i>
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan	20.414.730 1.642.242*	0 Kegiatan	42.748.868	0 Kegiatan	43.519.868	0 kegiatan (3 Rapat)

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (0,42%)		Realisasi Bulan Februari 2025		Realisasi SP2D hingga Februari 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
	Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan						
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2,520,000 196,665*	1 NSPK		1 NSPK	46,619,345	2 NSPK
	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	4.200.000 1.161.510*	0 NSPK	0	0 NSPK	0	0 NSPK <ul style="list-style-type: none"> • Rakornis penyelesaian <i>pending issue</i> RPP Keamanan Pangan • Pertemuan Pra PAK RPP Label dan Iklan Pangan • Pra Ratek RSNI Beras Fortifikasi
	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	1.260.000 887.880*	0 NSPK	0	0 NSPK	0	0 NSPK

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (0,42%)		Realisasi Bulan Februari 2025		Realisasi SP2D hingga Februari 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
BDG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM Pangan Lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	8,400,000 4,941,699*	0	0	0 UMKM	0	0 UMKM
PCA-Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	10.500.000 3.036.012*	3 Produk	11.728.500	3 Produk	11.728.500	199 Produk Izin Edar (1 Rapat)
PEH-Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	14,700,000 4,516,680*	1 Kegiatan	34,095,005	1 Kegiatan	34,095,005	1 Kegiatan
QDB-Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Operasional pasar pangan segar aman Pusat	3.799.862 252.420*	0 Lembaga	12.490.106	0 Lembaga	12.490.106	0 Lembaga
	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang dibina	6.298.992 2.971.038*	0 OKKP	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga - Persiapan penilaian OKKPD Provinsi - Pertemuan Koordinasi Dekonsentrasi
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	2,874,732 488,250*	0	0	0 Kelompok Masyarakat	0	0 Kelompok Masyarakat
QIA-Pengawasan	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat	Pengawasan, Investigasi dan	12.591.600 5.836.446*	0 Laporan	9.792.000	0 Laporan	9.792.000	0 Laporan (1 Kegiatan)

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (0,42%)		Realisasi Bulan Februari 2025		Realisasi SP2D hingga Februari 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
dan Pengendalian Produk	Keamanan dan Mutu Pangan	Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan						
QMA-Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	6,300,000 1,495,242*	0 Data	0	0 Data	0	0 Data
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan		17.661.000 9.345.000*	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada output/RO dan komponen lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional posisi bulan Februari Tahun 2025 sebagaimana tabel 2 di atas, realisasi anggaran per bulan Februari Tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sebesar Rp. 157.813.733,- atau (1,28%) dari target 5,12% berdasarkan anggaran setelah dikurangi blokir. Realisasi anggaran per Direktorat sampai dengan bulan Februari 2025 sebagaimana tabel 3 berikut. Pada Bulan Februari 2025 sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan dan perencanaan. Selain itu, anggaran belum dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan terkait dengan adanya wacana pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi belanja Kementerian/Lembaga.

Tabel 3. Realisasi Keuangan Per Direktorat Lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sampai dengan Bulan Februari Tahun 2025

No	Uraian	PAGU (Rp)		Realisasi (SP2D) (Rp)			Sisa Anggaran
		DIPA	Revisi	SP2D	% DIPA	% Revisi	
HA.6877	Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	40.284.839.000	12.333.462.000	208.931.578	0,52%	1,69%	12.124.530.422
	Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan	16,144,460,000	4,406,462,000	125,285,924	0,78%	2,84%	4,281,176,076
	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	8.372.000.000	2.927.000.000	6.115.180	0,07%	0,21%	2.920.884.820
	Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	15.768.379.000	5.000.000.000	77.530.474	0,49%	1,55%	4.922.469.526

Sumber: Data SAKTI Kementerian Keuangan

Dari tabel 3 di atas, realisasi keuangan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sampai dengan bulan Februari 2025 mencapai 0,52% atau sebesar 1,69 berdasarkan PAGU setelah blokir.

3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selama bulan Februari Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1. Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA pada Festival Ketahanan Pangan KKN-PPM 42 Universitas Padjajaran (UNPAD), 01 Februari 2025

Sosialisasi B2SA pada acara Festival Ketahanan Pangan KKN - PPM 42 Universitas Padjajaran (UNPAD) di Desa Jatiendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat dilaksanakan tanggal 01 Februari 2025. Acara Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan, Dosen pembimbing KKN Unpad, Kepala Desa Jatiendah, perwakilan mahasiswa KKN - PPM Universitas Padjajaran, kader posyandu RW di Desa Jatiendah serta masyarakat Desa Jatiendah. Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional menjadi Narasumber pada acara tersebut dengan tema Sosialisasi Konsumsi B2SA.

Pada kesempatan tersebut disampaikan peran keluarga terutama Ibu, akan pentingnya konsumsi pangan B2SA, mulai dari cara penyajiannya yang mudah dan murah, untuk diterapkan dalam konsumsi ditingkat rumah tangga sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Selain acara sosialisasi konsumsi pangan B2SA, juga diadakan lomba mewarnai untuk anak TK dan SD dengan tema B2SA, yang diikuti sekitar 40 orang. Direktorat PKP juga memberikan dukungan merchandise B2SA berupa tumbler, dompet dan kaos.



2. Kontribusi pada kegiatan B2SA Goes to School (BGtS) di Kabupaten Bekasi, 05 Februari 2025

Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan ikut berpartisipasi pada kegiatan B2SA Goes to School (BGtS) yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi di SMA Negeri 2 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada tanggal 5 Februari 2025. Acara BGtS dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, diikuti oleh 200 siswa kelas 10 dan 11 SMA Negeri 2 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Plt. Sekda Kabupaten Bekasi menyampaikan pentingnya memberikan perhatian khusus pada pola makan anak-anak untuk mengonsumsi makanan B2SA demi masa depan generasi anak-anak yang tumbuh dengan baik, tidak stunting, berkualitas dan menjadi generasi emas Indonesia 2045. Selain itu perlu ditingkatkan kesadaran pada siswa dengan tidak membuang makanan (*food waste*).

Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan mengenalkan dan mengedukasi siswa sekolah mengenai pentingnya memilih pangan lokal sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Selain itu, tidak hanya memahami manfaat pangan sehat, tetapi juga membiasakan untuk mengonsumsi pangan yang menjadi potensi daerah (pangan lokal) karena mudah memperolehnya. Hadir juga narasumber dari Ahli Gizi menyampaikan Syarat dan Porsi Nilai Gizi Makanan dan Minuman yang dikonsumsi.

Kegiatan ini dirangkai juga dengan acara Gerakan Minum Jus Bersama dan penyerahan bantuan perlengkapan makan berupa tumbler dan kotak bekal makan secara simbolis oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi. Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan, juga memberikan merchandise B2SA berupa dompet, tumbler dan kaos berlogo B2SA.



3. Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA pada Festival Anak Sholeh dan Terampil (FASTER) 7 Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kabupaten Kuningan, 21 Februari 2025

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kesadaran gizi generasi muda, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan turut menyemarakkan gelar Festival Anak Sholeh dan Terampil (FASTER) 7 yang digelar di Kabupaten Kuningan Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2025. Dalam kesempatan tersebut, sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan sehat diberikan kepada 300 santri dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2.

Acara ini menjadi momentum penting dalam mengedukasi para santri mengenai pola makan sehat berbasis pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Para santri diajak untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep B2SA yang menekankan variasi makanan, kecukupan gizi, serta keamanan pangan. Selain itu, santri juga diajak untuk membiasakan diri mengonsumsi pangan sehat yang ada di sekitar mereka sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari, serta tidak menyisahkan makanan.

Adapun bentuk dukungan lainnya adalah dengan turut dibagikannya 300 porsi menu B2SA kepada para santri. Setiap menu terdiri dari nasi, ikan bakar, tempe, tahu, sayur, dan buah, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Langkah ini diharapkan dapat memberikan contoh nyata bagaimana pola makan sehat berbasis pangan lokal mudah diterapkan dalam keseharian santri. Pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2, KH Fauzi Muhammad Ali menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh NFA. Diharapkan kegiatan-kegiatan serupa seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak santri yang memahami pentingnya pola makan bergizi seimbang serta mampu menerapkannya dalam keseharian.



4. Mengikuti Diskusi Pemetaan Dukungan K/L dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), 04 Februari 2025

Diskusi dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 04 Januari 2025 secara daring zoom meeting. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Bappenas dan dihadiri oleh Eselon II/Perwakilan dari 23 K/L. Hadir dari Bapanas perwakilan Dit 3.1, Dit 3.3 dan Biro PKH.

Rapat ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Kick Off Meeting Evaluasi Awal Pelaksanaan MBG yang menyepakati penyusunan regulasi berupa Inpres untuk menampung koordinasi dan dukungan K/L pada pelaksanaan MBG.

Poin-poin Diskusi pembahasan adalah sebagai berikut :

- a. Bapanas telah membuat mapping dukungan KL untuk pelaksanaan MBG dan membutuhkan konfirmasi masing2 K/L.
- b. Hasil mapping dari Bappenas untuk Bapanas mencakup dukungan jaminan ketersediaan stok bahan baku pangan, stabilitas harga, dan keragaman bahan pangan; serta menyusun strategi dan pedoman penanganan limbah sisa makanan.
- c. Dit 31 telah menyampaikan dukungan sesi tusi berupa promosi (edukasi/sosialisasi konsumsi pangan B2SA bagi penerima manfaat) dan telah melakukan kegiatan tersebut sejak tahun 2022, di samping itu juga pentingnya pemanfaatan dan menu pangan lokal untuk MBG sesuai amanat Perpres 81/2024.
- d. Berdasarkan hasil diskusi, dukungan Bapanas sesuai tusinya meliputi:
 - Menyediakan data ketersediaan stok bahan baku pangan
 - Menyusun strategi dan pedoman penyelamatan pangan pada SPPG
 - Penyediaan data pemasok pangan segar asal tumbuhan yang sudah memiliki izin edar
 - Edukasi dan sosialisasi pola konsumsi pangan B2SA kepada penerima manfaat (bumil, busui, balita, anak sekolah)
 - Penjaminan mutu dan keamanan pangan segar pemasok SPPG
 - Penjaminan sarana penyimpanan SPPG melalui penerbitan sertifikat/surat keterangan SPPB PSAT
- e. Terkait dengan dukungan promosi pola konsumsi pangan, sejalan dengan kegiatan:

- Kemendikdasmen: Edukasi dan promosi perubahan perilaku bagi siswa, tendik, dan orang tua terkait gaya hidup sehat, gizi dan pangan
- Kemenkes: Edukasi dan promkes terkait konsumsi gizi seimbang

Rencana Tindak Lanjut:

Berdasarkan hasil mapping dan diskusi ini, Bappenas akan menyusun draft Inpres untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dari K/L.



5. Mengikuti Rapat Koordinasi Mitra Ditjen PDM, 04 Februari 2025

Rapat dipimpin oleh Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen PAUD Dasmen, Kemdikdasmen. Beberapa poin penting pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. Program Gerakan Sekolah Sehat yang merupakan program prioritas, sudah tidak ada lagi.
- b. Dengan adanya struktur organisasi yang baru, maka akan ada perubahan/penyesuaian.
- c. Saat ini terdapat 4 program prioritas, yaitu:
 - Penguatan Pendidikan Karakter dan Kesehatan Sekolah (penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia, makan bergizi gratis dan penguatan usaha kesehatan sekolah)
 - Wajib Belajar 13 tahun dan pemerataan Kesempatan Pendidikan (perluasan akses 1 tahun pra SD, perluasan akses pendidikan menengah, akselerasi penanganan anak tidak sekolah, penguatan pendidikan nonformal dan informal)
 - Penguatan Pendidikan Literasi, Numerasi dan Sains Teknologi (pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini, peningkatan kecakapan literasi)
 - Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan (renovasi sekolah)

Tindak Lanjut:

- a. BGN tetap mengajukan draft R-Perpres yang mengatur penyelenggaraan MBG secara menyeluruh disertai naskah urgensi untuk segera disampaikan Kemensetneg.
- b. Bappenas sebagai mitra BGN perlu mempercepat penyelesaian Inpres, yang berisi dukungan, tugas dan fungsi KL dalam mendukung pelaksanaan MBG untuk menjadi acuan dukungan K/L.
- c. Kemenko Pangan akan melakukan rakor untuk meminta arahan terkait regulasi yang diperlukan, untuk mendukung MBG.

7. Mengikuti Rakor SPHP Menjelang HBKN Puasa dan Idul Fitri 2025, 12 Februari 2025

Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Pangan Nasional, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kepala Komunikasi Kepresidenan, Deputi II Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Sekretaris Kemenko Pangan, Sekjen kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Ketua Ombudsman Indonesia, Satgas Pangan Polri, Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, BUMN /BUMD, dan asosiasi pelaku usaha pangan.

Rakor bertujuan untuk menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pengendalian inflasi, khususnya dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri Tahun 2025.

Berdasarkan hasil diskusi dan paparan dirumuskan bahwa:

- a. Ketersediaan stok komoditi pangan strategis dipastikan aman menjelang Puasa dan Idul Fitri dan harga diusahakan stabil, distribusi pangan harus lancar supaya masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah.
- b. Setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan selalu memantau secara berkala ketersediaan dan harga pangan diwilayah masing-masing.
- c. Kolaborasi dan sinergi semua pihak untuk mendukung ketersediaan dan stabilitasi harga pangan menjelang HKBN Puasa dan Idul Fitri 2025.

8. Menghadiri Diseminasi Temuan Awal Studi Action Against Stunting Hub (AASH) Indonesia dan Diskusi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting, 13 Februari 2025

Beberapa poin-poin pembahasan sebagai berikut:

- a. Pertemuan ini dibuka oleh Wakil Rektor UI Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia. Dilanjutkan presentasi awal studi AASH oleh Dr Umi Fahmida (Country Lead AASH Indonesia), dan diskusi panel yang di moderatori oleh Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D (Rektor Universitas Yarsi) dengan penanggung dari Kemenkes, Kemendikdasmen dan Bapanas.
- b. Tujuan dari pertemuan ini adalah penyampaian hasil temuan awal studi AASH dalam mendorong percepatan penurunan stunting.
- c. Studi AASH merupakan studi tipologi stunting melalui pendekatan anak secara utuh yang dilaksanakan pada 2019-2024 di tiga negara yaitu India, Indonesia, dan Senegal.
- d. Studi AASH di Indonesia dengan lokasi Kabupaten Lombok Timur dengan fokus studi observasi pada 702 ibu hamil yang dilanjutkan hingga anak mereka berusia 24 bulan, serta studi intervensi menggunakan telur sebagai makanan tambahan sebanyak 3 butir telur seminggu untuk mengetahui efektivitas peningkatan kualitas asupan selama kehamilan terhadap epigenetik dan stunting pada bayi.
- e. Hasil temuan AASH:
 - Akses untuk makanan padat gizi (sayuran hijau daun, ayam, dan ikan) termasuk dalam golongan kesulitan sedang (30 hingga 70 persen) untuk semua domain eksternal yakni ketersediaan, harga dan kebersihan pangan.
 - Ibu yang mengalami gangguan mental (stres) secara signifikan memengaruhi perkembangan kognitif bahasa dan motorik anaknya pada usia 18 hingga 24 bulan.
 - Satu dari tiga bayi mendapatkan makan selain ASI pada tiga hari pertama atau prelakteal.
- f. Bapanas turut berpartisipasi dalam percepatan penurunan stunting diantaranya melalui kegiatan Rumah Pangan B2SA.



9. Mengikuti Rapat Koordinasi Paparan Rencana Garis Besar (RGB) Diklatsarmil dan Manajerial oleh Universitas Pertahanan (Unhan), 17 Februari 2025

Rapat dibuka oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan dipimpin oleh Wakil Penyelenggara Kegiatan Rekrutmen SPPI Batch 3. Dihadiri oleh Kabagdiklat Kemhan, perwakilan Ditjen Potensi Pertahanan Kemhan, Pejabat Eselon 1, 2, 3 Unhan, Tim Manajerial, dan Tim Pusat yakni BPKP, BPOM, BI, IPB, APJI, dan Bapanas (perwakilan Dit 3.2 dan 3.1).

Agenda rapat adalah RGB Diklatsarmil dan Manajerial untuk peserta SPPI Batch 3 sejumlah kurang lebih 30.000 orang yang dilaksanakan di 15 Dankolat tersebar di 17 provinsi (55 lemdik). Dalam hal ini Bapanas berperan dalam peningkatan kompetensi SPPI dalam Diklat Manajerial. Diklat Manajerial dilaksanakan melalui Pelatihan Tenaga Pengajar secara ToT yang diawali dengan Pelatihan ToT terpusat. Hasil rapat antara lain :

a. Mekanisme Pelatihan ToT Terpusat di Unhan Sentul

- Akan dilaksanakan selama 4 hari pada tgl 24-28 Februari 2025 di Unhan, Sentul.
- Alokasi Peserta ToT untuk Bapanas adalah sebanyak 34 Calon Tenaga Pengajar dari 17 provinsi (diharapkan perwakilan pengajar per provinsi 2 orang).
- Peserta ToT memiliki kewajiban men-ToT-kan ke tenaga pengajar di provinsi masing-masing.

- Hari ke-1, seluruh peserta wajib mengikuti arahan Presiden dan pejabat terkait lainnya.
 - Hari ke-2, Bapanas Pusat mendapatkan alokasi 2 JP dengan Tema Penjaminan Keamanan Pangan Segar dan Peningkatan Penganekaragaman Pangan (1JP=50mnt).
 - Anggaran 34 peserta Bapanas akan ditanggung Unhan (DIPA BGN). Oleh karena itu Unhan memerlukan data 34 peserta ToT secepatnya untuk menentukan denah penginapan (laki2/perempuan) dan mengalokasikan anggaran pelatihan ToT.
- b. Mekanisme Sharing Knowledge dari peserta Pelatihan ToT Terpusat ke Tenaga Pengajar di 17 provinsi
- Setelah Pelatihan ToT di Unhan Sentul, peserta akan dipulangkan ke masing-masing daerah dan wajib sharing knowledge kepada tenaga pengajar lainnya di wilayahnya.
 - Unhan tidak mempersiapkan anggaran dari peserta pelatihan ToT terpusat untuk sharing knowledge tenaga pengajar lainnya di provinsi masing2. Oleh karena itu, mekanisme sharing kownledge diserahkan kepada instansi, contoh melalui zoom/video/CD yang disebarakan.
 - Terdapat waktu sekitar 2 bulan (sebelum pelaksanaan Diklat Manajerial) untuk masing2 peserta pelatihan ToT terpusat/instansi pusat dapat melakukan sharing knowledge kepada seluruh tenaga pengajar di 17 provinsi.
- c. Mekanisme Pengajaran ke SPPI Batch 3 dalam Diklat Manajerial
- Akan dilaksanakan pada 14 Juni – 15 Juli 2025 di masing2 Lemdik Lokasi Dankolat.
 - Berkaitan dgn keterbatasan tenaga pengajar dari masing2 instansi, maka instansi perlu berkoordinasi dengan Dankolat masing2 provinsi untuk menentukan jadwal penyampaian materi masing2 dalam Diklat Manajerial.
 - Unhan melalui BGN akan mengalokasikan honor tenaga pengajar sesuai jumlah JP dengan besaran sesuai SBM yg berlaku.
 - Tenaga pengajar Bapanas di masing2 provinsi mendapatkan alokasi 4 JP dalam Diklat Manajerial.

Tindak Lanjut:

- Bapanas telah menyampaikan bahwa peserta ToT akan mix pusat dan daerah, oleh karena itu Bapanas perlu segera menyampaikan data 34 peserta ToT Unhan Sentul untuk rencana anggaran dan denah penginapan.
- Bapanas perlu segera menyampaikan ketersediaan/kesanggupan tenaga pengajar di setiap provinsi untuk mengatur jadwal pemaparan materi Bapanas dalam Diklat Manajerial di masing-masing provinsi.

10. Menghadiri pertemuan Joint Annual Assessment (JAA) 2024 Scaling Up Nutrition (SUN) Movement Indonesia

Rapat diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMMK) Bappenas. Tujuan rapat adalah untuk membahas penilaian SUN Movement Indonesia 2025 untuk dilaporkan pada pertemuan SUN Global yang akan diadakan di Afrika pada November 2025 serta mempersiapkan pertemuan N4G yang akan diadakan di Paris.

Scoring assessment dilakukan dengan pemberian nilai pada matriks assessment yang terdiri dari 4 bagian, yaitu:

- a. Penyediaan informasi dasar terkait gizi.
- b. Koordinasi dan komunikasi antar lembaga serta lembaga kepada masyarakat terkait gizi.
- c. Pembiayaan terkait gerakan yang berkaitan dengan promosi dan edukasi gizi.
- d. Pembagian informasi mengenai gizi yang dilakukan oleh jejaring SUN.

Berdasarkan hasil diskusi assessment, secara keseluruhan skor Indonesia pada JAA, yaitu skor 4 untuk pembiayaan terkait gerakan yang berkaitan dengan promosi dan edukasi gizi serta pembagian informasi mengenai gizi yang dilakukan oleh jejaring SUN. Sedangkan untuk penyediaan informasi dasar terkait gizi dan koordinasi dan komunikasi antar lembaga serta lembaga kepada masyarakat terkait gizi dari jejaring SUN diberikan skor 3.

Evaluasi prioritas SUN Indonesia di antaranya:

- a. Mengadvokasi kerangka penta-helix untuk meningkatkan kualitas dan ruang lingkup intervensi gizi.

- b. Edukasi dan intervensi gizi untuk masyarakat.
- c. Sistem penggunaan data terpadu untuk pemantauan dan evaluasi gizi yang lebih baik.
- d. Peningkatan kapasitas dan pengembangan jejaring di tingkat sub nasional.
- e. Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gizi yang muncul, seperti climate change malnutrition, gizi kurang, gizi lebih, dan kekurangan zat gizi mikro.



11. Mengikuti Workshop Country Strategic Planning (CSP) temuan utama dan rekomendasi dari Evaluasi Rencana Strategis Negara (CSP) 2021-2025, Februari 2025.

Workshop diselenggarakan oleh World Food Programme (WFP) Indonesia yang bertujuan untuk menyampaikan temuan utama dan rekomendasi dari Evaluasi Rencana Strategis Negara (CSP) 2021-2025. Workshop ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, organisasi internasional, dan mitra pembangunan lainnya.

Workshop ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi, antara lain: Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, WFP Indonesia, dan Mitra Pembangunan serta Organisasi Internasional.

Ringkasan Temuan Utama dan Rekomendasi CSP 2021-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kapasitas pemerintah berupa bantuan kepada pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam analisis ketahanan pangan dan gizi, sehingga kebijakan dan intervensi dapat lebih berbasis bukti.

- b. Implementasinya dapat dilihat dari Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang digunakan untuk menganalisis ketahanan pangan secara lebih akurat dan membantu dalam perencanaan strategis ketahanan pangan nasional.
- c. Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan fortifikasi beras yang berupa dukungan kepada pemerintah dalam upaya memperkuat akses masyarakat terhadap pangan bergizi melalui program makan siang bergizi gratis di sekolah dan intervensi fortifikasi beras.
- d. Penguatan sistem rantai pasok dan logistik dalam kesiapsiagaan bencana dengan cara meningkatkan efisiensi distribusi pangan dalam situasi darurat dan memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi krisis.

Tantangan yang dihadapi WFP:

- a. Keterbatasan sumber daya yaitu masih terdapat kendala dalam pendanaan dan kapasitas SDM untuk memberikan bantuan teknis yang lebih luas.
- b. Keterlambatan dalam implementasi beberapa intervensi di mana beberapa program mengalami hambatan dalam pelaksanaan akibat koordinasi dan perencanaan yang belum optimal.
- c. Diperlukan perluasan cakupan dukungan teknis di tingkat sub nasional dengan cara pendekatan yang lebih kuat untuk mendukung pemerintah daerah dalam ketahanan pangan dan gizi.

Rekomendasi dari workshop ini adalah

- a. Memperkuat strategi komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah agar rekomendasi yang dihasilkan lebih mudah diterapkan dan mendapat dukungan lebih luas dari pemangku kepentingan.
- b. Meningkatkan kapasitas staf dalam bidang teknis, kebijakan, dan penguatan kapasitas kelembagaan yang ahli dalam memahami aspek teknis dan kebijakan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
- c. Menyusun strategi yang lebih jelas dalam bantuan teknis dan non-teknis agar program WFP dapat lebih terarah dalam memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan dan gizi.

- d. Meningkatkan alokasi sumber daya dan kemitraan untuk efektivitas CSP: Dengan menjalin lebih banyak kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi internasional, diharapkan keberlanjutan program dapat lebih terjamin.

Masukan untuk CSP yang disusun WFP dari Dit 3.1 yaitu memasukkan upaya percepatan konsumsi pangan lokal sebagai salah satu Country Strategic Planning untuk menurunkan cost of diet. Hal ini berhubungan dengan korelasi negatif antara Cost of Diet study (Cost of Energy Only Diet dan Cost of Nutritious Diet) dengan Skor PPH di mana semakin tinggi Cost of Diet maka skor PPH makin rendah. Selain itu upaya percepatan konsumsi pangan lokal juga harus diimplementasikan pada program makan gizi gratis pada anak sekolah.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut :

Workshop ini memberikan wawasan penting mengenai keberhasilan, tantangan, dan peluang perbaikan dalam implementasi CSP WFP di Indonesia. Dengan adanya rekomendasi yang telah disampaikan, WFP dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat lebih optimal dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional. Evaluasi akhir akan dipublikasikan pada bulan November 2025 untuk menjadi dasar dalam penyusunan CSP selanjutnya.



12. Menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan R-Perpres Rencana Pangan Nasional Tahun 2025-2029, 25 Februari 2025.

Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Biro PKH Badan Pangan secara Hybrid, dipimpin oleh Kepala Biro PKH dan dihadiri oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dan perwakilan unit kerja Eselon II lingkup Badan Pangan Nasional.

Tujuan rapat adalah: penajaman kebijakan strategi naskah urgensi; pembaruan substansi dan data 2024 disesuaikan target RPJMN 2025-2029 serta memasukkan substansi digitalisasi dan pemanfaatan AI dalam rencana pangan.

Beberapa poin pembahasan antara lain:

- a. Pada lampiran R-Perpres, Bab II untuk setiap sub bab diminta untuk menambahkan kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan.
- b. Tiap Unit kerja agar dapat mengupdate substansi dan data sampai dengan hari Jumat/28 Februari 2024.
- c. Pusdatin akan memasukkan substansi digitalisasi dan pemanfaatan AI pada bab II lampiran R-Perpres

Tindak lanjut:

Biro PKH akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan mengundang Kemenko Pangan pada hari Jum'at/28 Februari 2025.

13. Menghadiri Rapat Penyusunan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2025-2029, 27 Februari 2025

Rapat dipimpin oleh Kepala Biro PKH dan dihadiri oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan serta perwakilan Unit Kerja Eselon II lingkup Badan Pangan Nasional. Bertujuan untuk menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Agenda pembahasan diantaranya:

- a. Pemutakhiran situasi ketahanan pangan berdasarkan capaian 2024
- b. Penyesuaian pohon kinerja
- c. Penyesuaian matriks kinerja
- d. Penyesuaian nomenklatur kegiatan

Kebijakan yang berpengaruh terhadap penyesuaian muatan Renstra Badan Pangan Nasional (penyesuaian kinerja dan target; penyesuaian nomenklatur kegiatan) diantaranya:

- a. Perpres Nomor 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

- b. Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
- c. Perbadan Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan Kedua Atas Perbadan Nomor 2 Tahun 2022 tentang OTK Badan Pangan Nasional

Timeline Penetapan Renstra K/L bulan Juni 2025. Sehubungan hal tersebut, dalam penyusunan Restra Badan Pangan Nasional bisa diparalelkan dengan penyusunan RPerpres tentang Perencanaan Pangan Nasional.

Badan Pangan Nasional berkontribusi terhadap 3 Prioritas Nasional (PN), yaitu:

- a. PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (PP: Swasembada Pangan; PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular)
- b. PN 5: Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar Wilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global)
- c. PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan (PP: Pengendalian Inflasi)

Sasaran Strategis yang diampu Direktorat 3.1 sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 adalah meningkatnya kualitas Konsumsi pangan dengan indikator Skor PPH Konsumsi (target 2025: 94) dengan indikator Sasaran Kegiatan:

- Konsumsi Buah dan Sayur (target 2025: 245,33 gr/kap/hari)
- Konsumsi Pangan Hewani (target 2025: 129,11 gr/kap/hari)
- Konsumsi Umbi-umbian (target 2025: 53,40 gr/kap/hari)

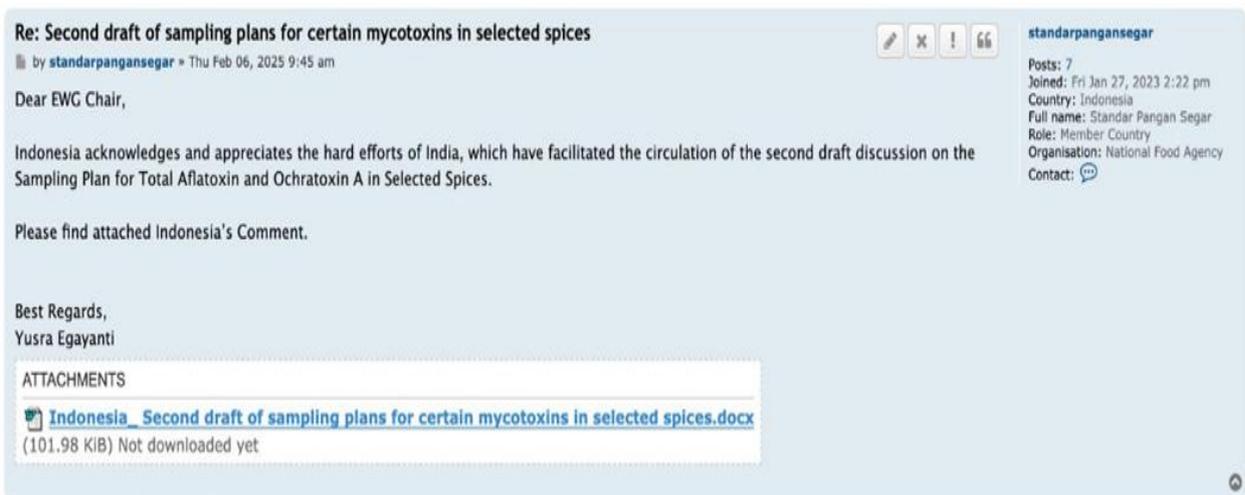
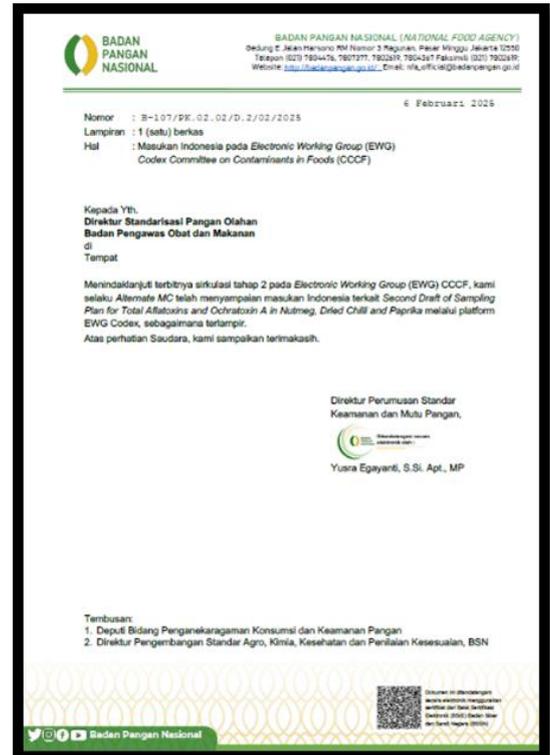
3.2.2 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Hasil pemantauan kegiatan prioritas lingkup Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan selama bulan Februari sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana Tabel 2, kegiatan fisik yang mendukung pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.2.1 Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan

1. Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada electronic Working Group Codex Committee on Contaminants in Foods

Menindaklanjuti terbitnya sirkulasi tahap dua pada electronic working group (eWG) Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF), Badan Pangan Nasional selaku alternate MC telah menyampaikan masukan Indonesia terkait draft Second Draft of Sampling Plan for Total Aflatoxins and Ochratoxin A in Nutmeg, Dried Chilli and Paprika, melalui platform eWG Codex tanggal 6 Februari 2025. Masukan posisi Indonesia terhadap tersebut juga telah dikirimkan kepada BPOM selaku Koordinator CCCF pada tanggal 6 Februari 2025.



2. Penyampaian Conference Room Document Posisi Indonesia pada Sidang Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables



Sehubungan dengan akan diselenggarakannya sidang Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV) ke-23 pada tanggal 25 Februari – 1 Maret 2025 di Mexico, Badan Pangan Nasional sebagai Koordinator MC CCFFV menyampaikan Conference Room Document (CRD) sebagai posisi Indonesia pada sidang tersebut. Penyampaian CRD melalui surat ke BSN No. B149/PK.02.02/D.2/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 selaku Codex contact point Indonesia.

3. Pemberian Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan



Untuk mendukung terciptanya iklim usaha dan praktek perdagangan yang adil, disusunlah regulasi terkait standar keamanan dan mutu pangan segar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu



pengetahuan serta adanya dinamika dalam implementasi di lapangan, terdapat mekanisme untuk melakukan evaluasi/ kajian ulang terkait regulasi dan standar yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, pelaku usaha dan OKKPD dapat berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional selaku OKKPP.

Pada bulan Februari ini, telah dikeluarkan rekomendasi terkait penggunaan nama dagang yang dapat dimaknai sebagai klaim, seperti “pulen” dan “wangi”. Surat rekomendasi tersebut sebagai tindak lanjut dari surat permohonan PT Food Station Tjipinang Jaya No. 191B/EKS-DO/FST/1/2025 tanggal 17 Januari 2025. Sesuai surat Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan No. B-129/PK.02.02/D.2/02/2025 tanggal 11 Februari 2025, jika nama dagang mengandung kata “pulen” dan “wangi” atau kata lain yang semakna dengan klaim mutu maka harus didukung dengan bukti pengujian laboratorium atas pemenuhan klaim tersebut.

3.2.2.2 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

1. Pertemuan Persiapan Training of Trainer Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3



Menindaklanjuti arahan Presiden dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Universitas Pertahanan, akan mendukung pelaksanaan diklat manajerial Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch-3 dengan kurikulum Penjaminan Keamanan Pangan Segar dan Peningkatan Penganekaragaman

Pangan. Pelaksanaan Diklat Manajerial tersebut akan diawali dengan Pelatihan Tenaga Pengajar secara Training of Trainer (ToT) terpusat pada tanggal 24 – 28 Februari 2025 dengan mengundang perwakilan dari 17 dinas urusan pangan provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.

Untuk itu, dilaksanakan pertemuan persiapan ToT guna meminta masukan calon peserta dari provinsi dan mengkoordinasikan mekanisme ToT. Nantinya peserta ToT perwakilan tiap-tiap provinsi berkewajiban untuk meneruskan knowledge ke tenaga pengajar di daerah.

2. Training of Trainer Tenaga Pengajar SPPI dari Dinas Urusan Pangan Provinsi Dalam Rangka Pendukung Program Makan Bergizi Gratis

Dalam rangka mendukung program prioritas presiden yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Pangan Nasional sebagai K/L yang bertanggung jawab atas pengawasan keamanan dan mutu pangan segar dipandang perlu memberikan pemahaman kepada SPPI terkait aspek keamanan dan mutu pangan segar, yang merupakan bahan utama dalam MBG. Untuk itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyampaikan usulan kurikulum terkait keamanan dan penganekaragaman konsumsi kepada Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) melalui surat No. 022/SM.04.01/D/01/2025.

Kegiatan ToT dilaksanakan pada 25 Februari 2025 di kampus Unhan Sentul dengan 17 peserta dari dinas urusan pangan provinsi. Materi yang disampaikan menekankan pada pentingnya pola konsumsi B2SA pada program MBG berdasarkan potensi dan kearifan sumber daya lokal masing-masing wilayah serta kampanye gerakan penyelamatan pangan dengan stop boros pangan. Selain berupa slide paparan, materi pelatihan yang akan disebarakan juga berupa video singkat tentang metode uji cepat untuk mendeteksi adanya cemaran pada pangan segar. mendeteksi adanya cemaran pada pangan segar.

Sebagai tindak lanjut, Badan Pangan Nasional akan terlibat aktif dalam koordinasi identifikasi ketersediaan tenaga pengajar penjaminan keamanan pangan dan penganekaragaman pangan pada masing-masing dinas provinsi dan memastikan bahwa penyampaian ilmu (sharing knowledge) kepada tenaga pengajar lainnya terlaksana sebelum Diklat Manajerial SPPI Batch-3 dilaksanakan pada Bulan Juni-Juli 2025.



3. Pelatihan BTSF Sustained Training Mission (STM) on Composite Products

Composite products merupakan makanan yang mengandung produk olahan asal hewan dan produk asal tumbuhan, sebagaimana diatur dalam Regulation (EC) No 852/2004, (EU) 2022/2292, (EU) 2020/692, dan (EU) 2020/2235. Peraturan Uni Eropa terkait impor composite products berdampak signifikan terhadap akses pasar bagi pelaku usaha ekspor, antara lain karena kurangnya pemahaman tentang regulasi Uni Eropa tersebut. Better Training for Safer Food - Sustained Training Mission (BTSF STM) on Composite Products bertujuan untuk memfasilitasi otoritas dan pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang persyaratan keamanan dan mutu, sistem manajemen mutu dan prosedur lainnya terkait importasi composite products ke Uni Eropa.

Badan Pangan Nasional merupakan National Contact Point (NCP) dari BTSF, yaitu program kegiatan yang diinisiasi Uni Eropa untuk mengorganisir serangkaian pelatihan terkait keamanan pangan, kesehatan tanaman serta kesehatan dan kesejahteraan hewan. Salah satu program kerjasama pelatihan BTSF Uni Eropa adalah rangkaian pelatihan STM on Composite Products yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari hingga 7 Maret 2025 di 5 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Vietnam.



Pelatihan STM on Composite Products di Indonesia diselenggarakan pada tanggal 27-28 Februari 2025 atas koordinasi Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional dengan BTSF EU, dan diikuti oleh 15 pelaku usaha pangan olahan, perwakilan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pertanian (Kesmavet), dan Badan Pangan Nasional (Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan serta Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan).

4. Pelantikan PPNS Bidang Pangan yang diselenggarakan oleh Dit Pidana AHU Kemenkum

Tindak lanjut terhadap pengawasan di peredaran dalam pembinaan dan/atau pemberian sanksi. Sesuai dengan amanah UU No. 18/2012 pasal 111, pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan KUHP Pasal 1 ayat (1) penyidik yang dimaksud adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sejalan dengan KUHP, UU Pangan pasal 132 menyatakan bahwa selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.

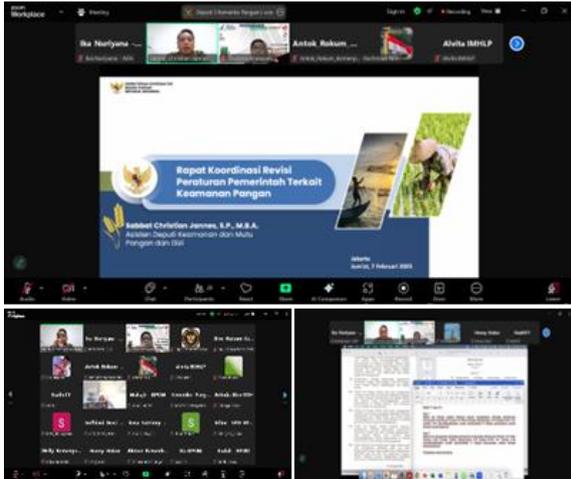
Untuk itu, Badan Pangan Nasional selaku K/L yang melaksanakan pengawasan pangan segar membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang pangan segar. Sebelum diangkat dan dilantik menjadi PPNS, calon PPNS telah diklat untuk para calon PPNS dari tanggal 24 Juni sampai 22 Agustus 2024 yang diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri. SK pengangkatan pejabat PPNS telah diterbitkan 31 Januari 2025 oleh Direktur Pidana Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah yang dilaksanakan tanggal 19 Februari 2025 di Graha Pengayoman Gedung Setneg Kementerian Hukum Jakarta, sebanyak 15 orang PPNS Bidang Pangan dari pusat dan daerah.



3.2.3 Penyusunan Standar Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan.

1. Rapat Koordinasi Lanjutan Penyelesaian Pending Issue Revisi Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Rapat koordinasi lanjutan dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rapat koordinasi tanggal 13 Januari 2025 yang diselenggarakan oleh Kemenko pangan. Rapat ini diselenggarakan pada 7 Februari 2025 secara daring untuk penyelesaian pending issue pasal 47 ayat (2c) terkait pengawasan pangan olahan industri. Badan Pangan Nasional sebagai pemrakarsa bersama Kemenko pangan memfasilitasi rapat ini. Rapat dipimpin oleh Asdep Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi- Kemenko Pangan dan dihadiri oleh perwakilan dari BPOM, Kemenperin, dan Bapanas (Biro OSH



dan Dit. 32).

Pada pertemuan ini telah diperoleh usulan rumusan penjelasan pasal 47 ayat (2c) yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan BPOM-Kemenperin, yaitu:

Alternatif 1 “Dalam hal Pangan Olahan berbasis industri, pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dilaksanakan oleh Kepala Badan dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sesuai dengan kewenangannya.”

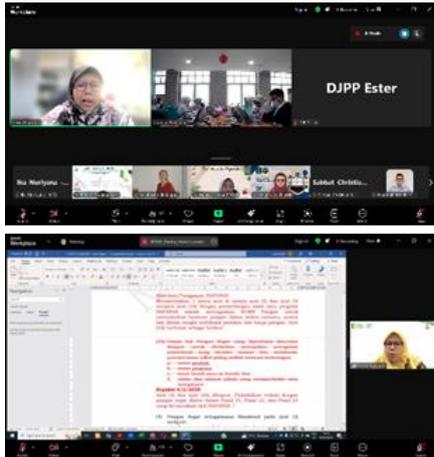
“Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan untuk Pangan Olahan dilaksanakan oleh Kepala Badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sesuai dengan kewenangannya.”

Sebagai tindak lanjut atas hasil rapat ini, perwakilan BPOM dan Kemenperin akan menyampaikan hasil pertemuan dan usulan rumusan penjelasan yang baru tersebut ke pimpinan masing-masing, yang akan dibawa ke rapat selanjutnya.

2. Mengawal Masukan Pembahasan RPP Revisi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Salah satu amanah dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pengaturan lebih lanjut terkait label dan iklan pangan diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dalam pasal 103 dan 107. Untuk itu, guna menjalankan amanah undang-undang tersebut perlu dilakukan revisi PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan disesuaikan dengan UU No. 18 Tahun 2012. Penyusunan RPP tersebut diprakarsai oleh BPOM.





Dalam pasal 108 UU Pangan telah ditetapkan bahwa Badan Pangan Nasional diberikan amanah untuk melakukan pengawasan terhadap pangan segar termasuk aspek label dan iklan. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pangan Nasional berperan aktif dalam mengawal jalannya pembahasan RPP tersebut dan telah menyampaikan usulan dan masukan melalui surat Plt. Sestama ke Sestama BPOM No.11/HK.02.02/A/01/2025 tanggal 3 Januari 2025. Rapat pembahasan telah dilaksanakan 5 kali, setiap minggu di bulan Februari.

3.2.2.4. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina

1. Pertemuan Persiapan Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Pangan Segar OKKPD Provinsi

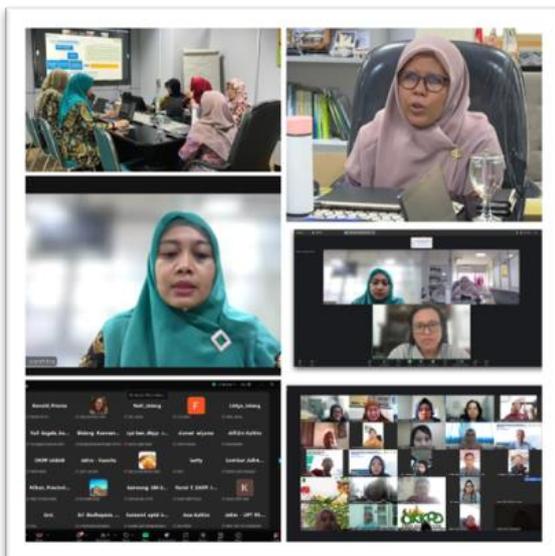
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa urusan pengawasan pangan merupakan urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan hal tersebut, pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar selain dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional (selaku OKKP-P) juga diturunkan untuk dilaksanakan oleh dinas urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, guna menjalankan amanah tersebut dan meningkatkan sistem pengawasan pangan segar di daerah disusunlah Peraturan Badan Pangan Nasional No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan.

Dalam rangka implementasi Peraturan tersebut, dilaksanakan penilaian sistem manajemen pengawasan pangan segar di daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2025 terdapat 7 provinsi yang akan dinilai yaitu provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. Untuk itu, dilakukan pertemuan persiapan penilaian dalam



rangka meningkatkan pemahaman personel di dinas terkait data dukung yang dibutuhkan. Penilaian OKKPD berupa verifikasi dokumen dan tinjauan lapang akan dilakukan pada bulan Maret – April 2025. Diharapkan penyerahan sertifikat kepada provinsi dapat dilaksanakan pada rapat koordinasi Kedeputian atau pada kegiatan peringatan World Food Safety Day di bulan Juni.

2. Pertemuan Koodinasi Kegiatan Dekonsentrasi Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar OKKPD Kabupaten/Kota



Dalam rangka penguatan sistem manajemen pengawasan keamanan dan mutu pangan pada tahun 2025, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan memberikan dana dekonsentrasi kepada 27 provinsi yang telah dilakukan penilaian kelembagaan keamanan pangan hingga tahun 2024. Ruang lingkup pemberian dana dekonsentrasi meliputi pengadaan bahan promosi keamanan dan mutu pangan, dan penilaian dan/atau surveilan kelembagaan OKKPD

kabupaten/kota serta koordinasi.

Namun, terdapat arahan dari Kementerian Keuangan terkait efisiensi alokasi anggaran Kementerian/Lembaga. Untuk itu, guna mengkoordinasikan kemungkinan berjalannya kegiatan penilaian kelembagaan OKKPD kabupaten/kota maka dilaksanakanlah pertemuan koordinasi pada dengan dinas urusan pangan provinsi yang menerima dana dekonsentrasi pada 7 Februari 2025 secara daring. Secara umum, dinas provinsi menyatakan komitmennya untuk tetap melakukan penilaian kelembagaan ke dinas kabupaten/kota disesuaikan dengan kemampuan anggaran dari masing-masing provinsi. Direktorat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan dinas urusan pangan provinsi untuk mengantisipasi dinamika kebijakan anggaran.

3.2.2.5. KEGIATAN DIREKTUR BULAN FEBRUARI 2025

1. Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) Makan Bergizi Gratis (MBG)

Rapat ini diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) tanggal 18 Feb 2025 di RR Dep IV Gedung L BIN Pasar Minggu Jaksel, dengan tujuan mengawasi pelaksanaan MBG yang menjadi salah satu PHTC Presiden. Kominpus akan mengawal MBG dengan pendekatan dan perspektif intelijen, sehingga MBG dapat terlaksana dg baik dan berdampak positif pada masyarakat luas.



Selain itu, rapat ini bertujuan melihat kendala dan kesiapan dari K/L terlibat antara lain Kemenko Pangan, Bapanas, dan BGN. Dalam rapat ini, Bapanas yang diwakili oleh Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menyampaikan materi terkait dukungan Bapanas dalam program MBG antara lain:

ketersediaan pangan, penjaminan keamanan dan mutu pangan, penganeekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal, konsumsi pangan B2SA, rencana Pelatihan SPPI, serta upaya Bapanas terkait *food loss and waste*.

2. Audiensi dengan PT. Food Station

Menindaklanjuti adanya permohonan rekomendasi terkait perubahan nama dagang produk beras dari pelaku usaha yang berasal dari PT Food Station Tjipinang Jaya, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menerima



kunjungan konsultasi terkait permohonan tersebut secara luring di ruang Direktur PSKMP pada 14 Februari 2025. Kegiatan konsultasi ini dihadiri oleh Kepala Departemen Riset & Pengembangan Produk Baru dan staf PT Food Station, fungsional dan staf

Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan serta fungsional Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Adapun hal yang dikonsultasikan oleh pelaku usaha tersebut adalah terkait dengan penggunaan nama dagang produk beras yang mengandung sifat pulen dan wangi, penggunaan jenis/varietas sebagai nama dagang dan mekanisme pendaftaran nomor PSAT Nasional.

Direktur mendorong penggunaan nama dagang yang tidak menyebabkan misleading di masyarakat dan jika nama dagang mengandung klaim, maka harus dibuktikan dengan hasil pengujian. Selain itu Direktur juga menyampaikan bahwa jenis/varietas beras tidak diperkenankan digunakan sebagai merek/nama dagang, namun jenis/varietas beras dapat dimuat dalam keterangan label di kemasan. Sedangkan terkait dengan mekanisme penerbitan nomor PSAT Nasional dikonsultasikan dengan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

3. Narasumber di Universitas Negeri Surabaya

Dalam rangka mendukung penguatan peran Indonesia di bidang industri halal tersebut, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional turut berkontribusi sebagai narasumber dalam program Direktur Mengajar dan Pembekalan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Seri Magang Industri Halal yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Surabaya pada hari Rabu, 5 Januari 2025 secara daring.



Pemenuhan standar keamanan pangan dan sertifikasi halal penting untuk diperhatikan dalam memastikan keamanan dan mutu pangan. Kondisi pangan yang aman, baik, suci/bersih, lezat, dan informasi yang benar masuk dalam lingkup halal. Keamanan pangan juga mencakup informasi pada label kemasan pangan, khususnya label halal.

Kegiatan kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Badan Pangan Nasional ini diharapkan tidak hanya memberikan sharing knowledge kepada mahasiswa, namun juga mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang lebih siap dan berkompeten untuk berkontribusi dalam industri halal global.

f. Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pejabat dan Pimpinan Dinas Daerah

Menindaklanjuti disposisi Deputy III Pengantaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melaksanakan



Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi dengan pejabat daerah dan pimpinan dinas lingkup provinsi Jambi serta Kota Payakumbuh Sumatera Barat terkait Dukungan terhadap Program

Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tanggal 19 Februari 2025 di RR Nusantara II Kantor Badan Pangan Nasional. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, serta dihadiri oleh Kepala Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Sumbar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, DKP Kab/Kota lingkup Jambi (Kab. Kerinci, Kab. Tanjab Timur, Kab. Sarolangun, Kota Jambi, Kab. Batang Hari), Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Asisten Sekda Provinsi Jambi Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta perwakilan direktorat lingkup Dep III Bapanas.

Pertemuan ini menindaklanjuti surat dari daerah yang bertujuan untuk koordinasi dan konsultasi terkait dukungan terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Dukungan Badan Pangan Nasional terhadap program MBG antara lain pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di SPPG, registrasi sarana



penyimpanan, penyedia data pemasok pangan segar, pendampingan bimtek kepada pengelola SPPG, pelatihan keamanan pangan untuk SPPI bersama Unhan, serta edukasi/sosialisasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pangan di daerah dapat ikut mendukung MBG melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Terkait kegiatan pengawasan keamanan pangan yang dapat dilakukan lebih lanjut masih terus dikoordinasikan dg Badan Gizi Nasional sehingga teknis pelaksanaan di lapangan lebih jelas dan dapat diacu oleh Dinas di daerah.

3.2.3 Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan selama bulan Februari Tahun 2025 sesuai dengan capaian realisasi keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu:

1. AEA-Koordinasi (Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan)

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Koordinasi atas Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dilaksanakan sebagai berikut:

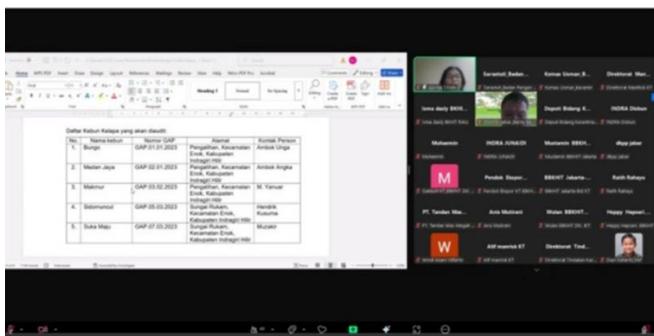
a. Panen Raya Jagung Tahap 1



Untuk mendukung Ketahanan Pangan dalam rangka terwujudnya Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas melalui Swasembada Pangan telah dilaksanakan program ini yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi jagung, tetapi juga bertujuan mendukung ekosistem pangan lokal. Jagung yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pakan ternak seperti ayam, bebek, dan hewan lainnya, sehingga

menciptakan siklus ekonomi yang saling mendukung di pedesaan. Panen Jagung serentak oleh Polri tanggal 26 Februari 2025 adalah penanaman yg di mulai dari bulan Nov dan Desember seluas 109.897,36 Ha dengan Estimasi Panen 549.486,80 s.d 1.098.973,61 Ton.

b. Rapat Persiapan Audit Kebun dan Rumah Pengemasan Buah Kelapa oleh Tim GACC



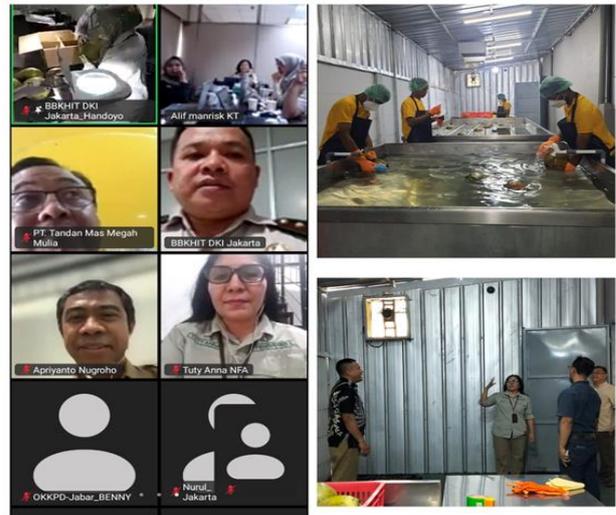
Persiapan audit kebun buah kelapa telah dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dalam melakukan pendampingan dalam penyiapan rekaman pengendalian OPT dan penggunaan pestisida (jenis, dosis, dan frekuensi penggunaannya) pada budidaya tanaman kelapa,

selanjutnya dilaksanakan rapat yang bertujuan untuk membahas persiapan audit virtual Tim the General Administration of Customs of the People’s Republic China (GACC) terhadap kebun dan rumah pengemasan buah kelapa Indonesia yang akan melaksanakan ekspor ke China, yang dijadwalkan pada 17-18 Februari 2025. Hasil diskusi terkait persiapan audit rumah pengemasan buah kelapa ialah agar pelaku usaha dapat mempersiapkan SDM, buah kelapa, sarana prasarana pendukung, dan

dokumen teknis (SOP dan formulir pendukung) terkait penanganan buah kelapa di rumah pengemasan.

c. Pendampingan Simulasi Audit Packing House/PH Kelapa Segar oleh Tim the General Administration of Customs of the People's Republic of China/GACC

Dalam rangka persiapan audit PH kelapa segar tujuan ekspor ke Tiongkok oleh GACC secara virtual pada 17-18 Februari 2025, telah dilaksanakan kegiatan simulasi audit PH secara hybrid pada 11 Februari 2025. Kegiatan simulasi audit PH dipimpin oleh Direktur Manajemen Risiko Barantin, dan dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, KBRI Beijing, Atase Perdagangan KBRI Beijing, Dinas Perkebunan (Provinsi Riau dan Kab. Indragiri Hilir), BBKHIT Provinsi (Riau, Lampung, dan Banten), Dewan Kelapa Indonesia, Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia, pelaku usaha kebun dan PH kelapa segar, Dinas Pangan Prov. Jawa Barat (OKKPD).



Kegiatan simulasi audit bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaku usaha PH kelapa segar (PT Tandan Mas Megah Mulia) dalam pelaksanaan audit oleh GACC. Simulasi audit dilaksanakan melalui pemaparan profil perusahaan, penjelasan dan praktek penanganan buah kelapa segar tujuan ekspor ke Tiongkok, mulai dari penerimaan bahan baku sampai distribusi. Secara umum kesiapan PH makin baik, namun masih perlu dilakukan perbaikan.

d. Rakor Pelindungan Sumber Daya Hayati dan Go Ekspor

Rapat koordinasi telah dilaksanakan dalam rangka mensukseskan ekspor durian segar ke Tiongkok serta mendukung Asta Cita ke 2 (dua) “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional lebih dari 8%.



Selanjutnya, dalam rangka audit oleh GACC, rapat koordinasi dilanjutkan dengan peninjauan langsung kesiapan rumah kemas di 2 (dua) lokasi, yaitu PT Nusantara King Fruit, Kota Palu; dan PT Sentra Pangan Sejahtera, Kab. Parigi Moutong; serta 2 (dua) lokasi kebun di Kec. Kasimbar dan Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong. Seluruh pelaku usaha yang telah didaftarkan dalam kegiatan audit GACC diharapkan dapat terus berkomitmen dan segera menyelesaikan perbaikan dengan optimal sebelum pelaksanaan Audit GACC.

e. Rapat Pembahasan Terkait Sistem dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MGB)

Pembahasan ini bertujuan mendapatkan masukan dari K/L terhadap Pedoman Sistem dan Tata Kelola Program MBG. Badan Pangan Nasional menyampaikan dukungan dalam program MBG, dengan penjaminan ketersediaan dan keamanan pangan bahan baku, dimana Badan Pangan Nasional telah membina pasar rakyat sebagai Pasar Pangan segar Aman (PAS AMAN) sebanyak 64 lokasi di 23 provinsi.



Penjaminan keamanan pangan bahan baku dilakukan melalui penerbitan nomor registrasi/sertifikasi dan pengawasan di peredaran.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas yang menangani dapur MBG, Badan Pangan Nasional melakukan ToT bagi tenaga pengajar Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada tanggal 24-28 Februari 2025 di Universitas Pertahanan Sentul Bogor dengan peserta sebanyak 34 orang dari 17 provinsi. Selanjutnya 34 orang ini akan melatih 32.000 SPPI di sekitar 930 titik.

f. Training BTSF “Sampling and Analysis: Mycotoxins”

Training diselenggarakan oleh Better Training for Safer Food Uni Eropa (UE) dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personil otoritas kompeten negara non-UE dalam melakukan pengambilan contoh dan analisis mikotoksin pada pangan segar. Training diikuti oleh perwakilan dari 13 negara non-UE yaitu Indonesia, Thailand, Laos, China, India, Argentina, Brazil, Maroko, Namibia, Benin, Republik Demokratik Kongo, Tunisia, Georgia.



Kegiatan dalam pelatihan ini meliputi: 1) penyampaian materi; 2) kunjungan ke Border Control Post di Salerno untuk mengamati dan mempelajari implementasi metode pengambilan contoh sesuai regulasi UE; 3) practical session untuk analisis mikotoksin pada

pangan segar di laboratorium Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rome.

Indonesia sebagai salah satu negara utama pengeksport pala ke negara-negara UE masih menerima notifikasi penolakan dari UE karena pala yang dieksport terdeteksi mengandung mikotoksin dengan konsentrasi yang melebihi standar yang ditetapkan UE. Oleh karena itu, cemaran mikotoksin, baik aflatoksin maupun okratoksin menjadi concern Indonesia dalam keamanan pangan segar.

Implementasi metode pengambilan contoh dan analisis yang tepat merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah adanya notifikasi penolakan pala oleh UE. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi penting untuk dapat mempelajari, mengevaluasi kembali, dan mengimplementasikan metode pengambilan contoh mikotoksin dengan tepat sesuai regulasi UE.

2. PCA-Perizinan Produk (Sertifikat Sarana dan Produk Pangan Segar)

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Perizinan produk atas Sertifikasi dan registrasi dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penerbitan SPPB PSAT dan Izin Edar PSAT-PL

Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan mendapat amanat untuk melayani penerbitan Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) dan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPB-PSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan, sedangkan Izin edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal importasi yang akan diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia. SPPB-PSAT merupakan salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan izin edar PSAT-PL.

Pada bulan Februari 2025, terdapat total 280 permohonan baru berupa 14 permohonan SPPB-PSAT dan 266 Izin Edar PSAT-PL. Permohonan yang diterbitkan OKPP-P pada bulan Februari sebesar 10 SPPB-PSAT dan 169 Izin Edar PSAT-PL sedangkan yang ditolak atau TMS sebanyak 5 SPPB-PSAT dan 26 Izin Edar PSAT-PL. Total akumulasi permohonan yang masuk dari Januari 2025 sampai dengan Februari 2025 adalah sebanyak 134 SPPB-PSAT dan 809 Izin Edar PSAT-PL. Dari total 943 tersebut, sebanyak 378 permohonan sudah terbit dan 43 permohonan ditolak. Infografis layanan OKKPP-P periode Februari 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Infografis layanan OKKPP-P Periode Februari 2025

b. Audit Lapang SPPB-PSAT

Dalam menerbitkan SPPB-PSAT, salah satu tahapan yang dilakukan oleh Direktorat PPSKMP sebagai verifikator adalah audit lapang. Audit lapang bertujuan untuk melakukan verifikasi penerapan dengan dokumen yang diajukan pelaku usaha serta melakukan penilaian kesesuaian sanitasi higienis sesuai standar yang berlaku. Pada bulan Februari 2025, OKKPP telah melaksanakan audit lapang terhadap 3 pelaku usaha yang menangani PSAT asal importasi dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Audit Lapang SPP-PSAT bulan Februari 2025

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI AUDIT	TANGGAL AUDIT
1	PT TRINITI MAJU PERKASA	Kota Tangerang	6 Feb 25
2	PT RAJAWALI AGRO MAS	Kota Tangerang Selatan	13 Feb 25
3	PT FKS Multi Agro Tbk	Kab Cilacap	24 Feb 25

c. Sidang Komisi Teknis

Salah satu proses penerbitan SPPB dilaksanakan penilaian melalui rapat komtek bertujuan untuk memberi rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Sanitasi Higienis Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT), sehingga penerbitan melalui audit menjadi lebih obyektif, professional dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan semua auditor dapat memaparkan secara utuh gambaran masing-masing unit usaha yang telah diaudit, dan tim komtek dapat memberikan rekomendasi yang sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan masukan terhadap penilaian proses penerbitan SPPB, pada bulan Februari 2025 telah dilaksanakan 2 (Dua) kali Komisi Teknis OKKPP pada 10 dan 17 Februari 2025 secara hybrid.

Pelaku usaha yang diajukan pada rapat Komtek 10 dan 17 Februari 2025 berjumlah 13 (tiga belas) pelaku usaha yaitu:

1. CV Sinar Abadi
2. CV Bintang Dunia
3. PT Suriatama Cantik Abadi

4. PT Sekar Mulia Abadi
5. PT Logistik Pendingin Indonesia
6. PT Surabaya Pelleting Company
7. PT Cahaya Sukses Makmur
8. PT Maju Jaya Niagatama
9. PT Hasta Niaga Berkah
10. PT Eramas Agri Internasional
11. PT Global Berkat Usaha
12. PT Sinar Agung Agro
13. PT Duta Dagang Lestari

Penilai atau pakar yang hadir dalam komtek 10 dan 17 Februari 2025 yaitu: 1) IPB University oleh Dr. Rimbawan; 2) Universitas Gadjah Mada oleh Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc; 3) Universitas Brawijaya oleh Prof. Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP; 4) Badan Riset dan Inovasi Nasional oleh Dr. Mulyana Hadipernata, S.TP., M.Sc; 5) Badan Karantina oleh Tri wahyu Cahya Rini; 6) Badan Pangan Nasional oleh Apriyanto Dwi Nugroho, S.T.P, M.Sc; 7) Badan Pangan Nasional oleh Netra Mirawati, SP., MP; 8) Badan Pangan Nasional oleh Tuty Anna Samosir, SP., MM.

Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Komisi Teknis OKKP-P sepakat untuk merekomendasikan kepada Ketua OKKP-P agar menerbitkan SPPB-PSAT bagi seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Sidang Komisi Teknis pada 10 dan 17 Februari 2025. Namun, sebelum penerbitan, pelaku usaha harus terlebih dahulu melengkapi perbaikan yang disarankan oleh Komisi Teknis OKKP-P.



3. QDB- Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman)

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Koordinasi atas Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengawasan Pangan Segar

Monitoring PAS AMAN telah dilaksanakan di Pasar Pemerintah Daerah Kab Way Kanan, Lampung. Pada monitoring ini, dilakukan pengujian rapid test residu pestisida untuk sampel cabai rawit merah, cabai rawit hijau dan bawang merah dengan hasil negative serta rapid test formalin untuk sampel daging ayam dengan hasil negative. Pasar Pemda ini merupakan lokasi PAS AMAN tahun 2024. Dampak kegiatan PAS AMAN adakah sistem zonasi yg secara



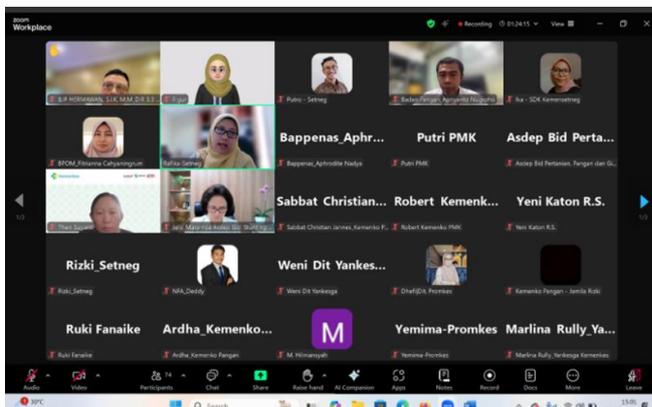
perlahan sudah mulai tertib, sanitasi higienis yang sudah semakin baik;

Pemerintah Daerah mengapresiasi NFA atas kegiatan pas aman di Kab Way Kanan, Lampung. Untuk mendukung kegiatan ini dinas pangan dengan dinas terkait, dan memfasilitasi sarana sanitasi dan pembelian rapid test formalin. Pada tahun 2024 Pasar ini telah melaksanakan pengujian rapid test sebanyak 96 dengan semua hasil aman.

4. QIA-PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUK

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Pengawasan dan Pengendalian Produk (QIA) atas Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan dan Mutu Pangan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Sinkronisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)



Dalam mendukung pelaksanaan program MBG, sedang disusun rancangan Inpres dukungan K/L sesuai dengan kewenangan masing-masing K/L. Rapat bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bentuk regulasi/payung hukum dan K/L yang menjadi PIC, tindak lanjut pembentukan Tim Cepat Tanggap

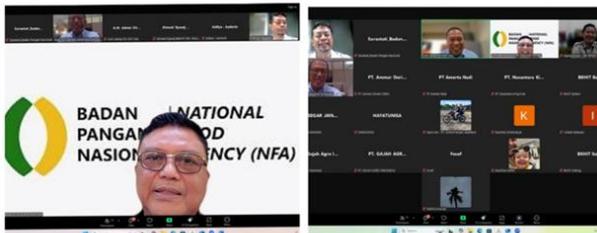
(satgas) lintas K/L, penyusunan SOP untuk pengelolaan pangan yang aman mulai dari penyediaan bahan baku sampai dikonsumsi dan penentuan kriteria sebaran titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekolah yang akan dipilih pada program MBG.

Badan Pangan Nasional akan memberikan dukungan sesuai tugas utamanya dalam penjaminan keamanan pangan segar dan mengharapkan payung hukum berupa Inpres agar dapat segera diterbitkan untuk menjaga pelaksanaan tugas K/L pada program MBG tidak tumpang tindih. Dalam Pengendalian KLB yang dapat terjadi pada program MBG, disarankan agar mengoptimalkan sistem yang sudah ada



tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini. Optimalisasi infrastuktur dan sistem informasi yang sudah ada sehingga tidak perlu dibentuk dashboard baru dan Tim Cepat Tanggap/Satgas. Kemendikdasmen sedang menyusun Pedoman untuk penyelenggaraan MBG di satuan pendidikan. Target Pembangunan SPPG adalah 3000-5000 SPPG tahun 2025.

b. Rapat Review Alur Proses Penanganan Durian Segar di Packing House/PH



Pertemuan ini bertujuan mereview alur proses penanganan durian segar di PH dan menentukan PH yang menjadi calon auditi pada simulasi audit GACC. Dari 14 PH yang teregistrasi oleh OKKP untuk ruang lingkup penanganan PSAT durian beku, terdapat 7 PH yang berkomitmen untuk melaksanakan ekspor durian segar dan dinilai memiliki kesiapan yang baik sebagai calon auditi, yaitu: 1 PH di Jabar (PT. Zarafa Ridho Lestari) dan 6 PH di Sulteng (PT Sentra Pangan Sejahtera, PT Silvia Amerta Jaya, PT.

Gajah Agro Indonesia, PT. Segar Jaya Mandiri, PT. Nusantara King Fruit, dan PT Herofruit Sumber Sukses. Dari ketujuh PH ini telah didaftarkan pada aplikasi China Import Food Enterprises Registration/CIFER untuk mendapatkan izin ekspor. Berdasarkan surat Barantin kepada GACC No B-604/KR.020/E/2/2025 tanggal 12 Februari 2025, diusulkan pelaksanaan audit lapang pada 9-14 Maret 2025.

c. Audit Rumah Kemas Kelapa Segar oleh Tim the General Administration of Customs of the People's Republic of China/GACC

Pelaksanaan audit kebun dan rumah kemas kelapa segar tujuan ekspor ke Tiongkok dibagi menjadi dua sesi, yaitu: a) sesi pertama (17 Februari 2025) rapat pembukaan dan audit kebun kelapa di lima lokasi kebun di Kab Indragiri Hilir (KT Sido Muncul, KT Sukamaju, KT Bungo, KT Medan Jaya, KT Makmur); b) sesi kedua (18 Februari 2025) audit rumah kemas PT Tandan Mas Megah Mulia.

Perwakilan Badan Pangan Nasional: a) memaparkan mekanisme pelaksanaan registrasi rumah kemas pada sesi rapat pembukaan; b) melakukan pendampingan secara virtual selama sesi audit dan secara fisik di rumah kemas. Pada sesi audit rumah kemas dilaksanakan pemaparan profil perusahaan, penjelasan dan praktek penanganan buah kelapa segar tujuan ekspor ke Tiongkok, mulai dari penerimaan bahan baku sampai distribusi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada periode bulan Februari Tahun 2025 sebagai berikut:

- 4.1.1 Berdasarkan DIPA awal Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Rp. 40.284.839.000.- dimana terdapat blokir sehingga anggaran menjadi Rp12.333.462.000,-.
- 4.1.2 Realisasi keuangan pada bulan Februari 2025 adalah sebesar 1,28% setelah pagu blokir. Dengan kata lain, realisasi keuangan sampai dengan bulan Februari tahun 2025 sebesar Rp. 208.931.578,- atau sebesar 1,69% dari Pagu DIPA setelah dikurang blokir.

4.2 Permasalahan

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, adanya efisiensi anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak optimal.

4.3 Rekomendasi

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan ke depan, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

- 4.3.1 Mengoptimalkan peran dan menambah jumlah sumber daya manusia.
- 4.3.2 Menyusun jadwal palang kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- 4.3.3 Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar III DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2024

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0677-9063-0000-7731

Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH		
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	690590	BADAN PANGAN NASIONAL															
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.900.312	5.389.205	12.748.470	12.798.229	25.279.350	25.734.950	24.851.302	24.981.277	31.524.960	28.141.227	26.573.457	52.795.715	275.718.455		
		BELANJA PEGAWAI	3.112.715	3.112.715	3.112.715	3.112.715	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	62.254.305	
		BELANJA BARANG	1.787.596	2.257.470	9.367.927	9.419.456	17.633.104	17.853.715	18.045.689	18.162.665	21.960.395	21.308.514	19.735.694	44.986.621	202.518.846		
		BELANJA MODAL	0	19.020	267.828	266.058	1.420.816	1.655.805	580.182	593.182	3.339.135	607.282	612.333	1.583.664	10.945.304		
		125.01.HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	195.043	227.367	2.937.769	3.096.451	6.031.081	6.031.081	6.031.081	6.031.081	6.031.081	6.031.081	9.031.081	6.515.935	12.633.739	64.792.789
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	195.043	227.367	2.899.716	3.058.398	5.954.974	5.954.974	5.954.974	5.954.974	5.954.974	5.954.974	8.954.974	6.439.829	12.470.590	64.020.789	
		53 BELANJA MODAL	0	0	38.053	38.053	76.106	76.106	76.106	76.106	76.106	76.106	76.106	76.106	163.149	772.000	
		125.01.HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	35.369	35.369	2.008.145	2.008.145	4.016.289	4.016.289	4.202.478	4.202.478	10.549.493	3.904.544	4.640.131	13.958.272	53.577.000	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	35.369	35.369	2.007.231	2.007.231	4.014.463	4.014.463	4.120.415	4.120.415	7.732.228	3.822.481	4.558.068	13.840.867	50.308.600		
53 BELANJA MODAL	0	0	913	913	1.826	1.826	82.063	82.063	2.817.266	82.063	82.063	117.404	3.268.400				
125.01.HA.6877	Pemantapan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	170.236	170.236	2.053.974	2.054.184	3.982.954	3.982.954	3.982.954	3.982.954	3.982.954	3.982.954	3.982.954	7.955.530	40.284.839			
52 BELANJA BARANG DAN JASA	170.236	170.236	1.863.494	1.863.695	3.601.994	3.601.994	3.601.994	3.601.994	3.601.994	3.601.994	3.601.994	7.193.619	36.475.239				
53 BELANJA MODAL	0	0	190.480	190.490	380.960	380.960	380.960	380.960	380.960	380.960	380.960	380.960	761.910	3.809.600			
125.01.WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	4.499.663	4.956.233	5.748.582	5.639.448	11.249.027	11.704.627	10.634.790	10.764.765	10.961.432	11.222.648	11.434.438	18.248.175	117.063.827			
51 BELANJA PEGAWAI	3.112.715	3.112.715	3.112.715	3.112.715	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	62.254.305			
52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.386.948	1.824.497	2.597.484	2.490.131	4.061.673	4.282.284	4.368.306	4.485.282	4.671.199	4.929.065	5.135.804	11.481.545	51.714.218				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0677-9063-0000-7731

Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		53 BELANJA MODAL	0	19.020	38.382	36.602	961.923	1.196.913	41.053	54.053	64.803	68.153	73.204	541.200	3.095.304

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pangan Nasional

ttd.
Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c)
NIP. 197411272022211004

Lampiran 2. Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Februari Tahun 2025 Sesuai Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan

Program, Kegiatan, KRO, RO		Jumlah Pagu		REALISASI s.d Februari 2025			Sisa Anggaran
		DIPA 22	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
HA.6877 Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		40.284.839.000	12.333.462.000	208.931.578	0,52%	1,69%	12.124.530.422
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.243.760.000	679.000.000	0	0,00%	0,00%	679.000.000
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	679.000.000	0	0,00%	0,00%	679.000.000
AEA	Koordinasi	14.349.130.000	3.290.452.000	94.206.622	0,54%	2,86%	3.196.245.378
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	1.635.382.000	44.571.574	0,57%	2,73%	1.590.810.426
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	1.264.060.000	6.115.180	0,13%	0,48%	1.257.944.820
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	391.010.000	43.519.868	0,90%	11,13%	347.490.132
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.900.000.000	534.775.000	46.619.345	2,45%	8,72%	488.155.655
AFA.001	NSPK Panganekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	46.825.000	46.619.345	7,77%	99,56%	205.655
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	276.550.000	0	0,00%	0,00%	276.550.000

Program, Kegiatan, KRO, RO			Jumlah Pagu		REALISASI s.d Februari 2025			Sisa Anggaran
			DIPA 22	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
AFA.003		NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	211.400.000	0	0,00%	0,00%	211.400.000
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		2.000.000.000	1.176.595.000	0	0,00%	0,00%	1.176.595.000
BDG.001		UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	2.000.000.000	1.176.595.000	0	0,00%	0,00%	1.176.595.000
PCA	Perizinan Produk		2.500.000.000	722.860.000	11.728.500	0,47%	1,62%	711.131.500
PCA.001		Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	722.860.000	11.728.500	0,47%	1,62%	711.131.500
PEH	Promosi		3.500.000.000	1.075.400.000	34.095.005	0,97%	3,17%	1.041.304.995
PEH.001		Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1.075.400.000	34.095.005	0,97%	3,71%	1.041.304.995
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		2.404.489.000	767.490.000	12.490.106	0,52%	1,63%	754.999.894
QDB.001		Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	60.100.000	12.490.106	1,38%	20,78%	47.609.894
QDB.002		Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	1.499.760.000	707.390.000	0	0,00%	0,00%	707.390.000
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		684.460.000	116.250.000	0	0,00%	0,00%	116.250.000
QDD.001		Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	684.460.000	116.250.000	0	0,00%	0,00%	116.250.000
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		2.998.000.000	1.389.630.000	9.792.000	0,33%	0,70%	1.379.838.000

Program, Kegiatan, KRO, RO			Jumlah Pagu		REALISASI s.d Februari 2025			Sisa Anggaran
			DIPA 22	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
QIA.002		Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1.389.630.000	9.792.000	0,33%	0,70%	1.379.838.000
QMA		Data dan Informasi Publik	1.500.000.000	356.010.000	0	0,00%	0,00%	356.010.000
QMA.001		Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	356.010.000	0	0,00%	0,00%	356.010.000
RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.205.000.000	2.225.000.000	0	0,00%	0,00%	2.225.000.000
RAG.001		Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	2.225.000.000	0	0,00%	0,00%	2.225.000.000